

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF *MAQÂSHID
SYARÎ'AH*
(STUDI KASUS: DI TPA PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARÎ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SITI FATIMAH
18103070064**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARÎ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan sampah merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi volume sampah yang meningkat. Kebijakan tersebut tercantum dalam Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Mengingat bertambahnya volume sampah di DIY khususnya di TPA Piyungan dengan menerima sampah sebanyak 750-770 ton perharinya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar dapat menyebabkan penumpukan sampah di TPA Piyungan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan serta dalam Perspektif *Maqâshid Syari'ah*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis serta pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Kantor Unit Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan serta beberapa warga sekitar TPA Piyungan. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan Pemerintah dan *Maqâshid Syari'ah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, masih belum sepenuhnya diimplementasikan di TPA Piyungan. Perihal tersebut dapat dilihat dari jumlah timbunan yang setiap tahunnya meningkat, metode pengolahan sampah yang digunakan di TPA Piyungan yang tidak sesuai dengan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013, kurangnya anggaran juga menjadi pemicu terlambatnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan. *Kedua*, Pengelolaan sampah dalam Perspektif *Maqâshid Syari'ah* menurut tingkatannya termasuk ke dalam tingkatan *darurriyat*. Dikarenakan sampah adalah permasalahan yang mendasar bagi umat manusia. Sehingga semakin meningkatnya volume sampah di TPA Piyungan maka akan menjadi pemicu kemudharatan lainnya dan jika tidak segera dikelola dengan baik dapat menimbulkan bahaya yang beresiko pada kerusakan keberlangsungan hidup manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan sampah sudah merepresentasikan kelima asas dalam maqashid syari'ah yaitu *Hifdzu Din, Hifdzu Nafs, Hifdzu Aql, Hifdzu Nasl, dan Hifdzu Mal*.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah; Kebijakan Pemerintah; *Maqâshid Syari'ah*.

ABSTRAC

The waste management policy is one of the actions taken by the Yogyakarta Special Region Government in dealing with the increase in the volume of waste. The policy is contained in the DIY Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. Due to the increase in the volume of waste in DIY, especially in the Piyungan TPA by receiving 750-770 tons of waste per day. Garbage that is not managed properly and properly can lead to waste in the Piyungan TPA. So the authors are interested in researching the policies of the Yogyakarta Special Region Government in waste management at the Piyungan TPA as well as in the *Maqâshid Syarî'ah* Perspective.

In this study, researchers used field research methods (field research). The nature of this research uses descriptive analysis research as well as an empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources derived from interviews with the DIY Environment and Forestry Service, the Piyungan Integrated Waste Disposal Unit (TPST) Office and several residents around the Piyungan TPA. While the secondary data sources come from books, journals, previous research, and documents related to this research. While the theory used in this research is the theory of Government Policy and *Maqâshid Syarî'ah*.

The results of this study indicate that first, the DIY Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Management of Household Waste and Types of Household Waste, is still not fully implemented in Piyungan TPA. This can be seen from the amount of generation that increases every year, the waste processing method used in the Piyungan TPA which is not in accordance with the DIY Regional Regulation Number 3 of 2013, the lack of budget has also triggered the delay in handling waste. Piyungan landfill management. Second, waste management in the perspective of *Maqâshid Syarî'ah* according to its level is included in the *darurriyat* level. Because waste is a fundamental problem for mankind. So that the increasing volume of waste in the Piyungan landfill will be a trigger for other losses and if it is not managed properly it can pose a risk of damage to human survival. The values contained in waste management already represent the five principles in maqashid shari'ah, namely *Hifdzu Din*, *Hifdzu Nafs*, *Hifdzu Aql*, *Hifdzu Nasl*, and *Hifdzu Mal*.

Keywords: Waste Management; Government policy; *Maqâshid Syarî'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah
NIM : 18103070064
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus: Di TPA Piyungan Kabupaten Bantul)” secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarannya.

Yogyakarta, 26 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10000
0DA20AJX766623442

Siti Fatimah

NIM: 18103070064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 18103070064

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Kasus: Di TPA Piyungan Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 2

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1024/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS: DI TPA PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI FATIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070064
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d949d6269e



Penguji I
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62cb856bf37b



Penguji II
Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62db895e37274



Yogyakarta, 06 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d9af2836421

MOTO

***“SELALU BERSIKAP BAIKLAH KEPADA SESEORANG,
KARENA AKAN TERJADI HAL YANG LUAR BIASA SAAT
KAMU MEMBUTUHKANNYA”***

-Siti Fatimah-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah, sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menuntaskan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Kamdani & Ibu Wagiyem

Teruntuk kakak kakak penulis, Nurmiyati, Sugianto & Yuniarti

Adik sepupu penulis Dewi Laras Sekar Kinanti

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sahabat & Teman yang berarti dihidupku tanpa terkecuali



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLETERISASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor :0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila kata sandang *Alif + Lam* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lam* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

رُؤَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laḏī unzila fihil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan diakhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARÎ’AH* (STUDI KASUS: DI TPA PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL)”, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Syariah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Gugun El-Guyanier, S.HI., LL.M. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang dengan keikhlasan, dan juga ketulusan hati memberikan masukan, dorongan dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap civitas akademika/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar

belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Ketua Balai Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Bapak Drs. Jito yang telah memberikan data-data ataupun dokumen selama melakukan proses penelitian yang dapat membantu serta mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Marwan selaku pengurus di Kantor Unit Pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Piyungan, yang telah memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Para narasumber masyarakat di daerah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan yang telah memberikan informasi dan data terkait penelitian ini.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Kamdani dan Ibu Wagiyem, kakak tercinta Nurmiyati, Sugianto, dan Yuniarti serta adik sepupu Dewi Laras Sekar Kinanti yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
13. Sahabat tersayang sejak SMA, Nur juhainah Ulfa, Nurlaila Muara Intan, Khairunnisrina Ramadhani, Muhammad Yusuf yang terus mendampingi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman sekaligus sahabat terdekat, Niesdha Asfiedha Hafshah, Putri Aisyah, Anna Khairunisa, Carla Yvete Pramesvara, yang terus mendampingi dan

memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having not days off, I wanna thank me for never quitting.*

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 13 April 2022

Penyusun



Siti Fatimah

NIM 18103070064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRAC</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLETERISASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan masalah.....	8
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
4. Telaah Pustaka.....	10
5. Kerangka Teori.....	14
6. Metode Penelitian.....	18
7. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN <i>MAQÂSHID SYARÎ'AH</i>	23
A. Teori Kebijakan Pemerintah.....	23
1. Definisi Kebijakan Pemerintah.....	23
2. Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah.....	25
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah.....	29
4. Tahap Pembuatan Kebijakan.....	31
B. Perspektif <i>Maqâshid Syarî'ah</i>	34
1. Definisi <i>Maqâshid Syarî'ah</i>	34
2. Maksud dan Tujuan <i>Syarî'ah</i>	37

3.	Konsep <i>Maqâshid Syarî'ah</i>	37
4.	Tingkatan <i>maqâshid syarî'ah</i>	38
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL, PERMASALAHAN PENGELOLAAN DI TPA PIYUNGAN DAN REGULASI HUKUM PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL.....		
46		
A.	Gambaran Umum Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	46
1.	Kondisi Umum Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.....	46
2.	Jenis Sampah Yang Dibuang di TPA Piyungan	48
B.	Permasalahan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Kabupaten Bantul.....	61
1.	Permasalahan Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan.....	61
2.	Timbulan Sampah Yang Masuk Ke TPA Piyungan (2018-2021).....	65
C.	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	71
1.	Latar Belakang Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	71
2.	Pengertian Pengelolaan Sampah	73
3.	Penanganan Pengelolaan Sampah	74
4.	Sanksi dan Ketentuan Pidana	76
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎ'AH ..		
78		
A.	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan Kabupaten Bantul	78
B.	Analisis <i>Maqâshid Syarî'ah</i> Terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan Kabupaten Bantul	84
BAB V PENUTUP.....		
95		
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		
98		
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
104		
CURRICULUM VITAE		
117		

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel di Bab III adalah sebagai berikut:

Tabel I : Karakteristik Sampah Yang Dibuang di TPA Piyungan

Tabel II : Data Timbulan Sampah (2018-2022)



DAFTAR GRAFIK

Daftar grafik merupakan penjabaran yang tercantum di Bab III sebagai berikut:

Grafik 1 : Jumlah Volume Sampah Perbulan Pertahun di TPA Piyungan (2019-2021)

Grafik 2 : Jumlah Volume Sampah Dari Sumber Penghasil Sampah (2019-2021)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan, keamanan, serta kepuasan dalam berkehidupan dan bernegara, dan terkhusus dalam pengelolaan dan penjagaan lingkungan. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dan kewenangan dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan sosial, dan ikut serta dalam membina dan memelihara keselamatan bumi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini didasari dari kewajiban pemerintah dalam menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan kebijakan untuk mengatur setiap tata kelola serta tata hukum kenegaraan khususnya pada pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meningkatnya jumlah penduduk secara signifikan serta adanya perubahan pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menambah volume sampah, jenis, dan karakteristik sampah, bahkan semakin beragam. Permasalahan sampah yang timbul hakikatnya juga menjadi permasalahan nasional, yang perlu di lakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu. Pengolahan sampah secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah

terpadu diterapkan untuk mengurangi limbah pada sumbernya. Ini berarti bahwa limbah yang dihasilkan harus dipulihkan dan didaur ulang untuk digunakan kembali, sehingga hanya residu yang di buang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal 1 menyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹ Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.² Pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Saat ini pengelolaan di TPA Piyungan masih belum optimal, hal ini dikarenakan berbagai kendala yang masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah baik itu kendala ekonomi, sosial budaya maupun teknologi. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan.³ Penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti amukan massa, bentrok antar warga, dan pemblokiran fasilitas TPA.

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1

² *Ibid.*, Pasal 3

³ Tuti Kustiah, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, 2005), hlm. 1

Karena warga sekitar TPA Piyungan merasa dirugikan dan dikecewakan dengan keberadaan TPA yang tidak dikelola dengan baik. Sebab, jalan kampung sebagai akses aktivitas warga kondisinya kotor dan becek.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Pemerintah dianggap kurang tegas dalam menangani masalah pengelolaan sampah tersebut. Kurangnya regulasi dan pengawasan dalam menangani pengelolaan sampah menyebabkan sampah-sampah di TPA Piyungan tidak terurus dan tidak dikelola dengan baik dan benar. Sehingga menyebabkan penumpukan sampah di TPA Piyungan. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA Piyungan sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang di TPA, salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber.⁴ Sebaiknya pemerintah lebih giat lagi dalam mengembangkan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan kembali sampah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi kerajinan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti yang sudah dinyatakan dalam Fatwa MUI No. 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, bagian ketiga mengenai pemerintah daerah

⁴ *Ibid.*, hlm 3

point a berbunyi “melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya”.⁵

Ditinjau dari permasalahan yang ada, bahwasannya peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penguasaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan, dan pengelolaan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu contoh dari permasalahan lingkungan dan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Dengan adanya UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.⁶ Berdasarkan dari

⁵ Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

permasalahan yang ada serta yang telah ditinjau maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan kebijakan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam pelaksanaannya adanya kebijakan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tentang pengelolaan sampah ini masih belum berjalan optimal dan seimbang. Secara umum pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta masih mengikuti paradigma lama, dimana sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Piyungan, Bantul. Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus di kelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2008 dan PP RI Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan volume sampah. Seperti yang dituangkan dalam

Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 19 yang menyatakan “Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya” dan pasal 20 menyatakan bahwa “Setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dahulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)”.⁷

Kota-kota besar di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kesulitan dalam mencari lahan yang memadai sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena tidak adanya lahan kosong yang luas untuk tempat pembuangan akhir sampah, sehingga mengharuskan beberapa kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta membuang sampah terakhirnya di Kabupaten Bantul yang memiliki lahan yang luas yaitu di TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir sampah, hal ini juga membuat pemerintah kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah di TPA. Seperti TPA Piyungan yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dasar hukum pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2001, 01/Pk-KDH/2001, 01 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan. Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut ditindak lanjuti dengan

⁷ Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 19 dan 20

dikeluarkannya Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 04/Perj/BT/2001, 38/Kep.KDH/2001, 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan. Dalam rangka pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Piyungan, maka dibuat perjanjian kerjasama Nomor 07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, dan 02/PK/2001 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul).⁸ Perjanjian ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA dengan tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan TPA dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis lingkungan.⁹

Masalah pengelolaan sampah di TPA Piyungan ini perlu dikuatkan dengan landasan hukum yang akan memudahkan, baik dalam pengelolaan maupun dalam rangka menangkap kerjasama investor. Sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aspek lingkungan lebih terkait dampak yang dirasakan penduduk sekitar, baik lingkungan terkait kesehatan maupun lingkungan sosial. Permasalahan cukup berat ditambah dengan keberadaan pemulung yang merupakan warga setempat di sekitaran lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan,

⁸ Yanatun Yunadiana, "Kajian Kelembagaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta" *Jurnal Riset Daerah*, Vol.VII, No.2, Agustus 2008., hlm 926

⁹ Karyadi Dirgo Suhandi, *Unit Pengelolaan Sampah Terpadu*, (ttp: tnp.,t.t.) hlm. 21

serta sapi peliharaan warga TPA Piyungan. Oleh karena itu dalam pengelolaan sampah, konsep lingkungan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Jika ditinjau dari konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesinambungan dengan *Maqâshid Syarî'ah* dimana didalam konteks ini pengelolaan sampah berkaitan dengan konsep masalah, karena menyangkut kesejahteraan dan keamanan warga sekitar TPA Piyungan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terdapat indikasi pengelolaan sampah yang belum optimal. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif *Maqâshid Syarî'ah* (Studi Kasus: Di TPA Piyungan Kabupaten Bantul)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 di TPA Piyungan?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 di TPA Piyungan, ditinjau berdasarkan sudut pandang perspektif *Maqâshid Syarî'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan ditinjau berdasarkan sudut pandang perspektif *Maqâshid Syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan keilmuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, serta ditinjau dari perspektif *maqâshid syari'ah*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Sehingga masyarakat setempat tidak merasa dirugikan dengan keberadaan TPA tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya. Selain itu, tujuan dari telaah pustaka yaitu untuk mengetahui sejauh mana substansial subjek pembahasan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari beberapa karya tulis penelitian yang membahas tentang Pengelolaan Sampah. Adapun penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan skripsi penulis sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pengelolaan Sampah di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul). Penelitian ini dilakukan oleh Wijiyanti, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Bandung, Playen, Gunungkidul. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah ini di nilai belum maksimal diterapkan di Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan. Dan pelayanan pengelolaan sampah hanya berfokus pada daerah perkotaan. Perbedaan skripsi penelitian Wijiyati dengan skripsi yang peneliti tulis yaitu tentang kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan

sampah di TPA Piyungan, dan ditinjau dari sudut pandang *Maqâshid Syari'ah*.¹⁰

Kedua, Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul). Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Syarif, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini memaparkan tentang penyebab keterlambatan pengangkutan oleh pihak PJPS di Desa Babadan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang disebabkan sering terjadinya penghentian aktivitas pengangkutan sampah yang terjadi di TPA Piyungan dikarenakan kapasitas area yang sudah tidak mencukupi hingga masalah sosial yang dirasakan warga sekitar TPA Piyungan, dan sudut pandang keislaman yang digunakan yaitu *Maslahah Mursalah*. Perbedaan skripsi penelitian Muhammad Syarif dengan skripsi yang peneliti tulis adalah dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta ditinjau dari sudut pandang *Maqâshid Syari'ah*.¹¹

¹⁰ Wijiyanti, “Implementasi Perda Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pengelolaan Sampah di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

¹¹ Muhammad Syarif, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Sleman)”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

Ketiga, Jurnal karya Ismanto dan Fauzi Syam, dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi”, diterbitkan oleh *Jurnal of Administrative Law*, Vol.1, No.3, Oktober 2020. Berdasarkan pada penelitian jurnal ini memaparkan kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi terkait pengelolaan sampah, belum adanya perda yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi yang menyebabkan masyarakat banyak yang tidak tertib, serta kurangnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Perbedaan penelitian ini terdapat pada Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan sampah, serta ditinjau dari sudut pandang *Maqâshid Syarî'ah*.¹²

Keempat, Jurnal karya Dedeng Yusuf Maolani dan Deding Ishak, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste”, diterbitkan oleh *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.1, No.2, 2018. berdasarkan pada penelitian jurnal ini memaparkan mengenai keterbatasan fasilitas yang ada di Kabupaten Dili, dalam hal transportasi hanya ada 4 unit yang beroperasi, kurangnya tenaga kerja dalam pengangkutan sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Perbedaan penelitian ini terdapat pada Kebijakan

¹² Ismanto dan Fauzi Syam, “Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal of Administrative Law*, Vol.1, No.3, Oktober 2020

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan sampah, serta ditinjau dari sudut pandang *Maqâshid Syarî'ah*.¹³

Kelima, Jurnal karya Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, dan Noeng Muhadjir, dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik”, diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol.8, No.8, Mei 2014. Berdasarkan pada penelitian jurnal ini memaparkan perbedaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik yang dilakukan lima kabupaten/kota di DIY, mengetahui perubahan kualitas lingkungan dan masyarakat akibat kebijakan pengelolaan sampah tersebut, dan metode pemantauan dan pengelolaan sampah yang berada di lima kabupaten/kota di DIY.¹⁴

Persamaan dari penelitian ilmiah ini dengan penelitian ilmiah sebelumnya adalah mengenai objek hukum yang digunakan yaitu mengenai Pengelolaan Sampah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ilmiah ini dengan penelitian ilmiah sebelumnya adalah mengenai kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani pengelolaan sampah di TPA Piyungan, serta perspektif islam yang digunakan ialah menggunakan perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

¹³ Dedeng Yusuf Maolani dan Deding Ishak, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.1, No.2, 2018

¹⁴ Mulasari, Husodo dan Muhadjir, “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 8, No. 8, Mei 2014

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung dalam sebuah penelitian. Hal ini karena kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁵ Dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu:

1. Teori Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari kata “*Policy*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb). Kebijakan dan kebijaksanaan merupakan dua kata yang berbeda. Pengertian kebijaksanaan merupakan pemikiran atau pertimbangan dan keputusan yang jauh mendalam, bukan keputusan untuk melanggar sesuatu. Walaupun istilah kebijaksanaan dan kebijakan memiliki perbedaan tetapi kedua kata itu mempunyai persamaan pula. Persamaan kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh para pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan (asas, norma) tertentu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

¹⁵ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021), hlm. 8

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah negara. Kata pemerintah menunjukkan perbuatan para pemimpin untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimiliki. Thomas R.Dye mendefinisikan bahwa kebijakan pemerintah sebagai “Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Maksud definisi tersebut adalah bahwa apabila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan misalnya melarang penduduk di daerah tertentu untuk tidak boleh membangun rumah di atas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, ini dinamakan kebijakan pemerintah. Sebaliknya jika tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk untuk mendirikan rumahnya di atas miliknya, maka itu pun disebut kebijakan pemerintah. Kedua tindakan pemerintah itu memberikan pengaruh (dampak) yang sama besarnya kepada masyarakat.

Definisi kebijakan pemerintah seperti yang sudah dijelaskan di atas secara umum memiliki enam implikasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi).
- b. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat.

- c. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya.
- d. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
- e. Tindakan-tindakan pemerintah mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tindakan-tindakan pemerintah selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik.¹⁶

2. Perspektif *Maqâshid Syari'ah*

Kata *Maqâshid*, merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan mashdar mimi dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-wanzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpah).¹⁷ Ibn al-wanzhur juga menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apa pun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya akan sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas). Berdasarkan makna makna tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *al-*

¹⁶ Universitas Pattimura, <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf> diakses pada tanggal 15 Juli 2022

¹⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), hlm. 5

qashd, dipakaikan untuk pencarian jalan benar dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* ini juga dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu perbuatan atau perkataan mestinya dilakukan dengan memakai berbagai pertimbangan keadilan, tidak dilebih-lebihkan dan tidak terlalu sedikit, tetapi diharapkan menjadi jalan tengah. Dengan demikian, *maqâshid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang ke jalan yang benar, dan kebenaran yang didapatkan dapat diamalkan secara teguh.¹⁸ Sedangkan kata *syarî'ah* dapat diartikan dengan tempat tumbuh dan sumber mata air yang bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula dengan halnya agama islam merupakan sumber kehidupan setiap umat muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan juga keselamatannya baik didunia maupun akhirat. Tanpa adanya *syarî'ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana tidak ada air untuk diminum. Dengan demikian, *maqâshid syarî'ah* secara bahasa artinya upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan memilih jalan yang benar berdasarkan ajaran islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. *Maqâshid syarî'ah* adalah tujuan akhir (al-ghayah) yang dikehendaki oleh al-syari' untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7

membawa kepada suatu kesimpulan, bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa, yaitu mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan (*Research Method*) merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.²⁰ Agar mempermudah dalam mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diharapkan, metode yang peneliti akan gunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari lapangan yang secara intensif yang disertai dengan analisa. Data lapangan yang diperlukan sebagai data untuk menunjang memperoleh informasi dari responden dan kemudian dapat ditarik dengan sebuah kesimpulan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus kepada kebijakan pemerintah

¹⁹ *Ibid.*, hlm 13

²⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia: tnp, 2010) hlm. 16

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan berdasarkan Perspektif *Maqâshid Syari'ah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan mengenai gambaran yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul, kemudian dapat ditarik dengan sebuah kesimpulan.²¹

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pengkajian mengenai korelasi antara hukum dan masyarakat, terutama pengaruh hukum terhadap masyarakat itu sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data yang dicari pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan ditinjau dari Perspektif *Maqâshid Syari'ah*. Adapun data tersebut dapat dicari dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan verbal yang bertujuan mendapatkan informasi atau data melalui pertukaran percakapan yang dilakukan secara langsung. Faktor-faktor yang

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2009).hlm 29

tersebut adalah: pewawancara, sumber informasi, materi informasi, materi pernyataan, dan situasi wawancara. dalam wawancara ini peneliti mengumpulkan data kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

b. Dokumen

Dokumen merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan sumber data, maka data yang diperoleh juga akan salah. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber dari data primer ini adalah diperoleh langsung dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu hasil observasi dan wawancara oleh: Bapak Drs. Jito selaku Kepala Balai Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Marwan selaku pengurus Kantor Unit Pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Piyungan, serta Bapak Abang, Bapak Suryono dan Ibu Tukimah selaku masyarakat sekitar TPA Piyungan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari dokumen yang resmi, buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam membahas analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dari bahan tersebut dapat di analisis mengenai kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah ditinjau dari perspektif *Maqâshid Syarî'ah* (Studi Kasus: di TPA Piyungan Kabupaten Bantul).

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, berisi tentang Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang pemaparan tentang konsep teori yang akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian yang akan peneliti tulis, teori yang akan digunakan yaitu teori Kebijakan Pemerintah dan perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

Bab *ketiga*, berisi tentang penjabaran hasil data lapangan dan kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani pengelolaan sampah di TPA Piyungan.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: di TPA Piyungan) ditinjau dengan perspektif *Maqâshid Syari'ah*.

Bab *kelima*, berisi tentang kesimpulan atas analisis penelitian yang telah diuraikan. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Dan tidak lupa memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait agar menjadi bahan evaluasi dari permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini menemukan beberapa hal tentang pengelolaan sampah di TPA Piyungan perspektif *Maqâshid Syarî'ah* sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya diimplementasikan secara langsung di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggung jawab dalam pengelola sampah di TPA Piyungan dinilai kurang tegas dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini dapat dilihat masih adanya Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 yang belum diterapkan seperti: (1) Kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota yang dimulai dari sumbernya, (2) sampah yang diangkut ke TPA bukan berupa sampah residu, (3) Metode pengolahan di TPA Piyungan yang tidak sesuai dengan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013. Pernyataan tersebut juga memerlukan partisipasi yang lebih dari kalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memahami pentingnya pengelolaan sampah yang berlandaskan kesadaran dari diri sendiri. Kurangnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan dan

pengendalian pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota. Sehingga dalam pengendalian sampah memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Kurangnya anggaran dana juga menjadi pemicu terlambatnya pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan pembenahan terhadap regulasi dan implementasi terhadap kebijakan yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di TPA Piyungan.

2. Pengelolaan sampah dalam perspektif *maqâshid syarî'ah* menurut tingkatannya termasuk ke dalam tingkatan daruriyyat. Dikarenakan sampah adalah permasalahan yang mendasar bagi umat manusia. Semakin meningkatnya volume sampah yang ada di TPA Piyungan maka akan menjadi pemicu kemudharatan lainnya dan jika tidak segera dikelola dengan baik dapat menimbulkan bahaya yang beresiko pada kerusakan keberlangsungan hidup manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan sampah sudah merepresentasikan kelima asas tujuan syar'i yaitu (*Hifz Din*) diwujudkan dengan memilah dan memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang untuk dijual kembali, hal tersebut juga dapat membantu menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA Piyungan, (*Hifz Nafs*) diwujudkan dengan menjaga kondisi lingkungan supaya tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, (*Hifz Aql*) diwujudkan dengan cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, (*Hifz Nasl*) diwujudkan dengan meningkatkan

kualitas kesehatan melalui cek kesehatan setiap sebulan sekali secara bergilir, (*Hifz Mal*) diwujudkan dengan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar TPA Piyungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif *Maqâshid Syari’ah* (Studi Kasus: Di TPA Piyungan Kabupaten Bantul)” maka penyusun memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengevaluasi kembali terkait kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan, sehingga diharapkan dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan dan masyarakat diharapkan lebih memahami dengan bijak terkait kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, sehingga mampu mengurangi timbulnya sampah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa' 1984

2. Fikih/Ushul Fikih/Buku

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2014

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013

Ardila, Radita, dkk. *Pengelolaan Sampah TPST Piyungan: Potret Kondisi Persampahan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman*, ttp: tnp, 2017

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syari'ah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008

Busyro, *Maqashid al-Syariah pengetahuan mendasar memahami masalah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Dunn, William. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999

Firda Ariyani, Safira, dkk. *Evaluasi Pengelolaan Sampah Di TPA Piyungan, Kabupaten Bantul*, ttp: tnp, t, t

Hakim Shah, Abdullah. *Yusuf Al-Qardhawi. Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Ismanto, Kuat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

Kustiah, Tuti. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, 2005

Mukri, Moh. *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011

Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Suhandi, Karyadi Dirgo, *Unit Pengelolaan Sampah Terpadu*, ttp: tnp.,t.t

Sujarwo dkk., *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*, Yogyakarta: tnp.,t,t

Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia: tnp, 2010

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021

Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014

3. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 95 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

4. Skripsi/Thesis

Anggi Widhiananto, Praditya. (2022) “Analisis Dampak Lingkungan Terhadap Komponen Abiotik dan Biotik Dari Kegiatan Penanganan Sampah Pada TPST Piyungan Di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, Diploma Thesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Ermiyanti, (2020) “Pelayanan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta”, Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Laely Priatna dkk. (2019) “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas”, disampaikan pada Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Muklis, Mochamad. (2018) “Pengelolaan Bank Sampah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Pada Bank Sampah Kota Malang”, Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Rahayu, Inten. (2018) “Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di TPST Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Upaya Mengurangi Banjir Sampah (Studi Kasus di TPST Piyungan, Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Yogyakarta”, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Syarif, Muhammad, (2022) “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Sleman)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wijiyanti, (2020) “Implementasi Perda Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pengelolaan Sampah di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Jurnal

Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, (2017) “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01

Amin, Muhammad. (2018) “Kedudukan Akal dalam Islam”, *Jurnal Tarbawi*, Vol.3, No.1

Bahson, Agil. (2011) “Masalah Sebagai Maqashid Al-Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No. 1

Dedeng Yusuf Maolani dan Deding Ishak, (2018) “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.1, No.2

Dinda Clasissa Aulia dkk., (2021) “Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Pesan Jepang”, *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1

Edwin Kiky Aprianto, Naerul. (2017) “Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah” *Jurnal Of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2

Hidayanti dan Efendi, (2020) “Praktik Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Vol. 2, No. 1

Ismanto dan Fauzi Syam, (2020) “Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal of Administrative Law*, Vol.1, No.3

- Muchtar, Henni. (2015) “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Humanus* Vol.XIV, NO.1
- Mulasari dkk, (2016) “Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2
- Mulasari, Husodo dan Muhadjir, (2014) “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 8, No. 8
- Paryadi, (2021) “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ahli”, *Jurnal Cross-Border* ,Vol. 4, No. 2
- Shidiq, Ghofar. (2009) “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118
- Suganda, Ahmad. (2020) “Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari’ah* Dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal at-Tadbir:Media Hukum dan Pendidikan*, Vol.30, No. 1
- Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir, (2014) “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.8, No.8
- Tri Widyaningsih dan Ahmad Ma’ruf, (2017) “Eksternalitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 18, No. 1
- Yanatun Yunadiana, (2008) “Kajian Kelembagaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta” *Jurnal Riset Daerah*, Vol.VII, No.2

6. Lain-Lain

Bappeda Yogyakarta,

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/208-pengelolaan-sampah , diakses pada tanggal 17 April 2022

Billy Adytya, <https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dan-sumbernya-klm.html> , diakses pada tanggal 24 Maret 2022

Carihadis.com, https://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/2723 ,diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, <http://dlhk.jogjaprov.go.id/sekilas-info-tpst-piyungan> , diakses pada tanggal 23 Maret 2022

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-sampah-68> , diakses pada tanggal 22 Maret 2022

Henoki Waruwu, <https://media.neliti.com/media/publications/168513-ID-pengelolaan-sampah.pdf>, diakses pada tanggal 31 Maret 2022

Rimbakita, <https://rimbakita.com/sampah/> , diakses pada tanggal 22 Maret 2022

Universitas Pattimura, <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf> diakses pada tanggal 15 Juli 2022

Wawancara dengan Drs. Jito, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, 21 Maret 2022